

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Agama merupakan sub sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama. Pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Agama lebih menitikberatkan pada pelayanan masyarakat di bidang agama.

Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu lembaga agama yang mengurus tentang pelaksanaan keagamaan masyarakat di Pesisir Selatan. Kementerian Agama kabupaten Pesisir Selatan menajalakan visi dan misi berdasaran keputusan menteri agama Nomor 2 Tahun 2010, Berikut tujuan Kementerian Agama Pesisir Selatan. 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 4. meningkatkan kualiatas penyelenggaraan ibadah haji. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>1</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 yang di atas, Kantor Kementerian Agama Kabuaten Pesisir Selatan membentuk struktur, diantaranya: 1. Seksi Bimbingan masyarakat Islam, 2. Seksi Penyelenggaraan haji dan umrah 3. Seksi Pendidikan agama Islam 4. Seksi

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010

Pendidikan diniyah dan pondok pesentren. 5. Kasi Pendidikan madrasah dan penyelenggaraan syariah, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi.

Pelaksanaan program-program di Kementerian Agama Pesisir Selatan membutuhkan manajemen yang baik. Manajemen suatu hal yang sangat penting, karena manajemen merupakan proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup> Selain itu manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.<sup>3</sup>

Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan merupakan faktor penentu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu manajemen agar suatu program organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari segi manajemen *actuating* atau pelaksanaan merupakan fungsi ketiga yang terpenting. Pelaksanaan atau *actuating* adalah perihal suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut The Liang Gie pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan

---

<sup>2</sup>H. Malayu S.P.hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014). h. 1

<sup>3</sup>Zainil Muchtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*. (Yogyakarta : Al-Amin Press dan IKFA, 1996), h.37

kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.<sup>4</sup>

Penerapan fungsi pelaksanaan tidak lepas dari peran anggota atau karyawan dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan sebelumnya. Pelaksanaan merupakan penyesuaian tugas kerja sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan dan mempunyai rasa tanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing.

Pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya di dalam suatu organisasi hendaklah dibangun bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Pekerjaan merupakan suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan atau anggota di dalamnya. Keahlian atau kemampuan sangat diperhitungkan untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan terlaksana program yang telah disusun pemerintah baik di dalam kantor atau di tengah-tengah masyarakat maka pelaksanaan merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya keberhasilan organisasi.

Mencapai tujuan organisasi peran pelaksanaan sangatlah penting, karena pelaksanaan program dalam organisasi melihat sejauh mana seorang pegawai atau anggota menjalankan tugas-tugas yang telah di amanahkan

---

<sup>4</sup> The Liang Gie dan Sutanto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Adminitrasi ( Yogyakarta : Karya Kencana, 1997).h. 191

sesuai dengan penempatan dan kemampuan dibidang masing-masing. Ayat Al-Qur'an mengisyaratkan tentang pelaksanaan tersebut antara lain adalah surat Az-Zumar (39) ayat 39.

قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ فَمَا كُنْتُمْ بِعَالِمِينَ ﴿٣٩﴾

*Artinya : Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.*

Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan beralamat di Jalan Imam Bonjol Kota Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Kementerian Agama Pesisir Selatan berdiri pada tahun 1946 berdasarkan Surat penetapan pemerintah Nomor 1/S.D tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharam 1365 H) yang dinyatakan: Presiden Republik Indonesia, mengingat; mengusulkan Perdana Menteri dan Badan Pekerjaan Komite Nasional Pusat, memutuskan: mengadakan Kementerian Agama<sup>5</sup>.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 5.749,89 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 234 Km.

---

<sup>5</sup> <https://kemenag.go.id/home/artikel/42956>, tanggal 24-Maret-2018

Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, sebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.<sup>6</sup>

Pada struktur organisasi kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan terdapat satu Kepala Kementerian Agama dan satu Kepala Sub Bidang Tata Usaha dan enam Kepala Seksi (Kasi) diantaranya: 1. Kasi Pendidikan Madrasah. 2. Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 3. Kasi Pendidikan Agama. 4. Kasi penyelenggaraan haji dan umrah. 5. Kasi Bimbingan Masyarakat Islam. 6. Kasi Penyelenggara Syariah.

Kemterian Agama Pesisir Selatan memiliki 15 Kantor Urusan Agama (KUA) di 15 kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : 1. KUA Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, 2. KUA Kecamatan Air Pura,3. KUA Kecamatan Silaut, 4. KUA Kecamatan Lunang, 5. KUA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, 6. KUA Kecamatan Pancung Soal, 7. KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti, 8. KUA Kecamatan Ranah Pasisia, 9. KUA Kecamatan lenggayang, 10. KUA Kecamatan Sutera, 11. KUA Kecamatan Batang Kapas, 12. Kecamatan IV Jurai, 13. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, 14. KUA Kecamatan Bayang , 5. KUA Kecamatan Koto IX Tarusan.

Salahsatu bagian di Kementerian Agama Pesisir Selatan yang menonjol adalah Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Program kerja

---

<sup>6</sup> <http://ppid.pesisirselatankab.go.id/profil-ppid/6/profil-kabupaten-pesisir-selatan.html>, tanggal 27 maret 2018

Bimbingan Masyarakat Islam berkaitan langsung dengan masyarakat seperti bimbingan pelaksanaan pernikahan, pembinaan perceraian dan rujuk serta bimbingan terhadap penghulu agama Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Pesisir Selatan.

Bimbingan Masyarakat Islam memiliki enam karyawan yaitu satu kepala dan 5 staf. Ke lima staf bertugas untuk mengkoordinatori 9 program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan di 15 KUA se-Kabupaten Pesisir Selatan.<sup>7</sup>

Sembilan program Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Pesisir Selatan: 1. MTQ, 2. Kepenghuluan, nikah dan rujuk (NR), 3. Kemasjidan, 4. Zakat, 5. Wakaf, 6. Pembinaan keluarga sakinah, 7. Penyuluh agama, 8. Kelembagaan keagamaan, 9. Produk halal.

Lima karyawan Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan sembilan program kerja dengan pembagian tugas sebagai berikut : 1. Mengerjakan bagian administrasi MTQ dan kepenghuluan, 2. Mengerjakan penyusunan bahan pembinaan masjid dan administrasi pengelolaan zakat dan wakaf, 3. Mengerjakan penyusunan keluarga sakinah dan administrasi penyuluh Agama, 4. Mengerjakan pengelolaan data kelembagaan keagamaan dan administrasi pengelola produk halal. Kemudian terdapat satu karyawan yang hanya fokus dalam pengolahan data.

---

<sup>7</sup> Sudirman, Kasi BIMAS, Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan, wawancara langsung, 15 maret 2018

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Pesisir Selatan mengatakan ada beberapa kegiatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai berikut, “ minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Bimbingan masyarakat Islam menyebabkan terjadinya rangkapan tugas, jauhnya jarak tempuh antara Kantor Kementerian Agama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan program menemukan beberapa kendala seperti banyaknya program kerja, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan jauhnya jarak tempuh Kantor Kementerian Agama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun dengan berbagai masalah yang dialami oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Pesisir Selatan program kegiatan tetap terlaksana dengan baik, bahkan pada tahun 2017 mampu meraih juara 1 program keluarga sakinah tingkat provinsi Sumatera Barat dan Juara 2 tingkat Nasional.

Hal ini yang mendorong penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang **“Bagaimana Pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan”**.

---

<sup>8</sup> Sudirman, Kasi BIMAS, Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan, wawancara langsung, 15 maret 2018

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk lebih memahami rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana Pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan”.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Program kerja Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pembagian kerja Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pelaksanaan tugas Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Faktor-faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui program kerja Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Untuk mengetahui pembagian kerja Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Mengetahui faktor pendukung dan kendala pelaksanaan program Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Guna penelitian ini untuk sebagai berikut :

- a. Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam program studi strata (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- b. Menambah pengalaman serta pengetahuan kepada penulis untuk memperluas wawasan tentang teori penelitian yang diperoleh dalam perkuliahan dan penerapannya pada kegiatan nyata.
- c. Menambah informasi tentang pelaksanaan program di Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan.

## E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul, maka penulis menerangkan kata-kata kunci dalam judul sebagai berikut :

Pelaksanaan : Pelaksanaan atau penggerakan merupakan hubungan antara aspek-aspek jndividual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap karyawan-karyawan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan yang nyata.<sup>9</sup>

Program : Rencana mengenai azas-azas serta usaha yang akan dijalankan sesuai dengan aktivitas.<sup>10</sup>

Bimas Islam : Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) merupakan salah satu bidang yang ada di Kemenetrian Agama Kab. Pesisir Selatan yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat.

Kemenag Kab. Pesisir Selatan : Lembaga agama yang terletak di Jl.Imam Bonjol Kota Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan.

---

<sup>9</sup> Melayu Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, (Jakarta : Bumi Aksara,2001),h.183

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia Kontenporer*, (Jakarta: Balai Pustaka),h. 67

Judul yang penulis maksud dengan judul di atas adalah Pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) di Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

**Bab I** : Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Sistematika Penulisan.

**Bab II** : Berisi tentang landasan teori yang menerangkan tentang pengertian pelaksanaan atau *actuating*, pentingnya pelaksanaan atau *actuating*, langkah-langkah pelaksanaan atau *actuating*.

**Bab III** : Gambaran umum objek penelitian yang berisi metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV** : Hasil penelitian tentang langkah-langkah pelaksanaan atau *actuating*, penyelenggaraan yaitu pemberian motivasi, pemberian bimbingan, koordinasi, penyelenggaraan komunikasi.

**Bab V** : Berisikan penutup berupa kesimpulan dan saran.